

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 terkait desa, bahwa desa ialah suatu kesatuan masyarakat mempunyai peraturan dan hukum yang bersatu dan punya wilayah perbatasan yang memiliki kewenangan dalam mengurus dan mengatur segala urusan dari pemerintahan, berdasarkan kepentingan dari masyarakat di desa yang berdasar dinamika masyarakat setempat, hak sejarah, juga hak adat tradisional diterima dan dihargai oleh struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga sangat utama didalam mencari potensi lokal yang tersedia di desa. Hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah desa mempunyai hak dalam untuk mengelola rumah mereka sendiri, salah satunya dengan menggunakan pemberdayaan masyarakat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Potensi lokal adalah kekuatan, daya, kemampuan, dan bakat yang dikelola dari desa dimanfaatkan untuk menumbuhkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Endah, 2020). Karena desa dituntut secara mandiri merespon berbagai permasalahan yang ada desa. Salah satu dalam permasalahan saat ini di desa yaitu permasalahan ekonomi.

Menurut (Shalahuddinta & Susanti, 2014) Saat kita memasuki dunia global saat ini, orang-orang harus terus mencari cara untuk memenuhi permintaan mereka dalam menghadapi masalah ekonomi yang rumit. Ragam barang dan jasa yang tersedia di pasar terus bertambah. Karena meningkatnya kebutuhan setiap manusia terutama di bidang ekonomi. Menurut pendapat (Lano, 2017) dalam ekonomi memiliki peran utama di dalam keseharian masyarakat. Setiap manusia seluruh global selalu bekerja sampai batas tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Setiap manusia yang sudah berkeluarga, yakni kepala keluarga wajib bekerja dalam mencari pendapatan bagi keluarga dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Sebab dari pernyataan sebelumnya, ekonomi adalah aturan manajemen keluarga. Karena perekonomian memainkan peran utama dalam memastikan bahwa kegiatan sehari-

hari terus berlanjut, ibu rumah tangga dan wanita lain akhirnya terdorong untuk bekerja untuk mendukung pendapatan tambahan suami mereka. Dengan memenuhi kebutuhan untuk membantu biaya pendidikan anak.

Dalam pandangan ekonomi tersebut bisa dilihat bahwa bagaimana peran kedua orang tua untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Perempuan yang rentan secara sosial salah satu masalah sosial adalah kerentanan ekonomi. Perempuan yang rentan secara ekonomi merasa tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Mereka perlu diberdayakan karena kondisi ini dianggap akan mengganggu kemampuan mereka untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sehari-hari (Purnama, 2019). Karena perempuan memainkan peran penting baik di ranah publik (masyarakat) maupun domestik (keluarga). Sebab itu dalam meningkatkan ekonomi perlu adanya pemberdayaan dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Hal ini disebabkan banyaknya angka pengangguran di masyarakat. Termasuk di desa tegalgondo banyaknya angka pengangguran menjadi penyebab penghambat dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Terutama pada Ibu rumah tangga yang mayoritas hanya menjalankan peran Ibu Rumah Tangga. Jumlah angka pengangguran masyarakat di Desa Tegalgondo sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Klasifikasi Umur Angkatan Kerja Penduduk di Desa Tegalgondo Tahun 2023

| No | Klasifikasi Jenis | Banyak Penduduk |
|----|---|-----------------|
| 1. | Banyak tingkat angkatan pekerja (penduduk umur 18-56 tahun) | 4.312 |
| 2. | Banyak tingkat angkatan penduduk umur 18-56 tahun pada usia masih sekolah dan belum bekerja | 1.434 |
| 3. | Banyak tingkat angkatan penduduk umur 18-56 tahun yang berprofesi ibu rumah tangga | 1.292 |

| | | |
|----|---|---------------|
| 4. | Banyak tingkat angkatan penduduk umur 18-56 tahun yang bekerja penuh waktu | 3.648 |
| 5. | Banyak tingkat angkatan penduduk umur 18-56 tahun yang kerja belum menentu | 664 |
| 6. | Banyak tingkatan angkatan penduduk umur 18-56 tahun yang punya kekurangan dan bekerja | 2 |
| | Jumlah Keseluruhan | 11.352 |

Sumber : Pemerintah Desa Tegalgondo

Dalam tabel tersebut jumlah usia angkatan pekerja di Desa Tegalgondo pada usia 18 sampai 56 tahun berjumlah 4.312 Orang. Dengan banyak usia penduduk dari 18-56 tahun menjadi ibu rumah tangga sebanyak 1292 orang pada tahun 2023. Pada jumlah tersebut usia 18-56 Tahun masih dalam usia produktif dalam bekerja. Sehingga bisa dianalisis jumlah ibu rumah tangga sebesar 15 persen dari jumlah keseluruhan yang berjumlah 7040 Orang. Sehingga dengan data tersebut pemerintah desa dan PKK bekerjasama dalam memberdayakan perempuan di desa tegalgondo untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Karena perempuan memahami posisi mereka dalam menjaga stabilitas keuangan keluarga terkait dengan keterlibatan mereka dalam mengelola keuangan keluarga, baik yang berasal dari pekerjaan produktif mereka maupun dari hasil mata pencaharian suami. Dalam rangka mempertahankan dan bahkan memperkuat ekonomi keluarga, perempuan dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi dengan memanfaatkan modal sosial yang mereka miliki, yang berupa jaringan sosial di masyarakat (Pemikiran & Volume, 2012).

Penentuan nasib sendiri demi terwujudnya dalam mencapai tujuan ekonomi keluarga yang sejahtera dibutuhkan dorongan dan bantuan dari pemerintah maupun lembaga yang menaungi pembedayaan. Baik bantuan dari pemerintah pusat, daerah, kabupaten maupun desa/kelurahan. Sehingga dalam proses pelaksanaan dibutuhkan

kerja sama antar pemerintah maupun masyarakat. Salah satu yang berfokus pada bagaimana permasalahan terjadi di desa tegalgondo yang terletak di kecamatan karangploso kabupaten malang. Dalam data laporan penduduk desa tegalgondo tahun 2023 ada sebanyak rumah tangga yang dikategorikan sebagai pra sejahtera sampai keluarga sejahtera 3 sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Klasifikasi Keluarga Sejahtera Tahun 2023

| | |
|-------------------------------|-------|
| Keluarga Pra Sejahtera (KK) | 278 |
| Keluarga Sejahtera 1 (KK) | 439 |
| Keluarga Sejahtera 2 (KK) | 794 |
| Keluarga Sejahtera 3 (KK) | 502 |
| Keluarga Sejahtera 3+ (KK) | 11 |
| Banyak Kepala Keluarga | 2.024 |

Sumber : Pemerintah Desa Tegalgondo

Bisa dianalisis dalam data tabel di atas yang berasal dari data prodeskel desa tegalgondo (Pokok et al., n.d.) dalam jumlah keseluruhan kepala keluarga di desa tegalgondo berjumlah 2.024 KK. Yang terdiri dari Golongan PraSejahtera sejumlah 278 KK, Golongan Sejahtera 1 sejumlah 439 KK, Golongan sejahtera 2 berjumlah 794 KK, Golongan sejahtera 3 berjumlah 502 KK, Golongan sejahtera 3+ berjumlah 11 KK. Pada analisis tersebut sekitar 15 persen jumlah kepala keluarga masih dalam kondisi dalam garis kemiskinan atau keluarga Pra Sejahtera. Sehingga perlu perhatian khusus pada pemerintah desa untuk merespon permasalahan tersebut. Yaitu dengan membuat kebijakan yang melibatkan seluruh aspek dalam partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya.

Sehingga urgensi penelitian penulis bahwa kerjasama Pemerintah Desa dan PKK untuk memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Dalam pelaksanaan pemberdayaan pemerintah desa tidak bergerak sendiri melainkan ada struktur organisasi salah satunya adalah PKK. Hal ini sejalan dengan pendapat (Pathony, 2020) karena pemberdayaan yang melibatkan masyarakat desa utamanya meningkatkan potensi yang terdapat pada masing pribadi juga organisasi

sosial PKK yang membutuhkan dorongan, mendukung atas potensi pada setiap individu atau organisasi sosial yang tadinya menggunakan tujuan pemberdayaan menunjukkan tingkat pencapaian atau perubahan yang perlu dilakukan untuk menciptakan masyarakat desa yang berdaya yang dapat mengubah dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator, katalisator dan regulator. Yang bersedia menyiapkan fasilitas bagi PKK dan membantu PKK dalam pengembangan program kegiatan. Dan membuat kebijakan-kebijakan regulasi bagi berjalannya kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)(Tengah, 2023). PKK juga berperan dalam memfasilitasi atau fasilitator, perencana, dan pelaksana dalam program pengembangan kehidupan berorganisasi, salah satunya adalah pemberdayaan. PKK sebagai fasilitator atau memberikan fasilitas kepada anggota wanita, PKK juga sebagai perencana dalam kegiatan-kegiatan anggota koperasi wanita sehingga kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota wanita lebih tersusun baik dan terencana, selain itu juga PKK sebagai pelaksana dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan anggota wanita, dimana telah ada tahap perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian ini sub fokus dari Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada penelitian ini yaitu fasilitator, perencana, dan pelaksana.

Pada organisasi perempuan di dalam masyarakat desa dan kelurahan ialah Pemberdayaan dan Kesejahteraan di Keluarga (PKK). Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) suatu lembaga kemasyarakatan yang menjadikan dinamika dalam pengembangan, membina, dan mempengaruhi keluarga sebagai tujuan utamanya dalam rangka terwujudnya ekonomi keluarga sejahtera pada lingkup sosial paling kecil. Tujuan utama PKK desa adalah mewujudkan kesejahteraan keluarga secara merata di setiap desa/kelurahan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa kesejahteraan ekonomi keluarga merupakan suatu norma dan ujung tombak pembangunan dan Keluarga adalah unit sosial terkecil yang akan memiliki dampak signifikan pada seberapa baik pembangunan berlangsung (Jember et al., 2020). PKK sebagai alat penggerak nasional

pemberdayaan sosial mempunyai berperan penting untuk membentuk keluarga yang beribadah untuk Tuhan Yang Maha Esa, beretika baik, bertutur baik, sehat, bersejahtera, berkembang, dan makmur, juga membangun keluarga yang berkeadilan gender, berkesetaraan, dan sadar hukum dan lingkungan bermasyarakat.(Lampung, 2022). Karena aspek pemberdayaan terletak pada organisasi sosial yang mampu bertumpu sendiri dan bermandiri dalam mengelola kemakmuran organisasi dan masyarakat sekitar.

Salah satu lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang berkolaborasi dengan pemerintah dan RT/RW adalah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), sesuai dengan misi Peraturan Regulasi Mendagri No. 36 Tahun 2020 tentang kegiatan melalui pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(PER.08/MEN/VII/2010, 2020). Dengan tujuan untuk mengelola upaya pemberdayaan ekonomi keluarga sejahtera, PKK punya fungsi yaitu fasilitator, perencana, pelaksana, pengatur, dan menggerak bagi seluruh pada bagian pemerintahan. Terdapat program 10 pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada dasarnya kebutuhan utama masyarakat. Hal ini terdiri dari gotongroyong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, kesehatan, pendidikan juga pengembangan keterampilan, penghayatan dan pengamalan Pancasila, serta penumbuhan kehidupan berkoperasi. Peraturan tersebut sejalan dengan RKPDes Desa Tegalondo tahun anggaran 2022.

Karena pemerintah Desa Tegalondo sudah memasukkan anggaran kepada 10 program PKK di desa tegalondo sesuai dengan hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021(Crystallography, 2021). Dengan alokasi anggaran tersebut digunakan agar program PKK sejalan dengan visi misi desa tegalondo untuk memajukan pemberdayaan masyarakat di perekonomian. Karena anggaran adalah faktor terpenting dalam berjalannya suatu organisasi sosial. Menurut teori dari A. Ambarwati mengenai kerja sama antar organisasi dalam bukunya berjudul perilaku dan teori organisasi (Ambarwati, 2018), Secara umum, organisasi digambarkan sebagai kelompok tersusun atas beberapa orang atau banyak individu dalam berkolaborasi atas tercapainya cita-cita bersama. Pengorganisasian ialah ruang

ataupun area dimana beberapa orang kumpul dengan cara metodis, terarah, termanage, dan rasional, dengan pemanfaatan semua sumber daya ada tersedia dengan cara efektifitas dan efisien. - termasuk uang, material, sarana, dan prasarana - untuk mencapai tujuan mereka. Dalam mencapai kerja sama sangat penting dibutuhkan beberapa aspek yang mendukung dalam pencapaian tujuan organisasi.

Menurut pendapat (Muhtar et al., 2022) ada faktor beberapa dalam pendukung melaksanakan kerjasama yang digolongkan pada tingkat berpartisipasi pemerintah dan masyarakat untuk membangun desa yang rasa solidaritas mendukung antara satu sama lain sangat tinggi. Hal tersebut sama dengan teori suharto (Suharto, 2004) pemberdayaan ialah melalui tujuan dan proses. Pemberdayaan ialah sebuah proses yang melibatkan sejumlah tindakan untuk meningkatkan berdayaan atau mengatur kelompok-kelompok yang terpinggirkan pada sosial masyarakat, seperti mereka sedang berusaha dengan terhindar kemiskinan. Selanjutnya, tetapkan poin-poin pemberdayaan sebagai target. Masyarakat yang mempunyai ilmu dalam pengetahuan dan berkemampuan untuk berdaya, adalah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan ekonomi, fisik, dan juga sosial. Termasuk punya rasa percaya sendiri, bisa memberikan ide dan inspirasi, memiliki mata pencaharian, berperan serta pada giat sosialisasi, dan juga mampu menjalankan peran kehidupan (Andika et al., 2019). Hal demikian bisa dianalisis pemberdayaan mampu membantu suatu kelompok masyarakat agar dapat mandiri dan mampu mendorong ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.

Dengan kondisi demikian menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian dan sebagai tolak ukur tidaknya Realisasi Kerjasama antara Pemerintah Desa dan PKK Desa Tegalgondo Kabupaten Malang. Dari latar belakang diatas penulis mengangkat judul : **“Kerjasama Pemerintah Desa dan PKK Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Tegalgondo Kabupaten Malang.**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk dari kerjasama Pemerintah Desa dan PKK Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Tegalgondo Kabupaten Malang?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan PKK dalam rangka menjalankan kerja sama sebagai upaya dalam meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Tegalgondo Kabupaten Malang?

C. Tujuan dan Manfaat dari Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk kerjasama Pemerintah Desa dan PKK dalam upaya meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Tegalgondo Kabupaten Malang.
- b. Untuk melihat faktor yang menjadi penghambat dan pendukung yang selama ini dihadapi oleh Pemerintah Desa dan PKK dalam menjalankan kerja sama sebagai upaya untuk meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Tegalgondo Kabupaten Malang.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana manfaat individu dalam memperoleh berupa manfaat wawasan dan ilmu baru mengenai “kerjasama Pemerintah Desa dan PKK Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Tegalgondo Kabupaten Malang”

- b. Bagi Obyek Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi landasan evaluasi yang bermanfaat bagi kerjasama antara Pemerintah Desa dan PKK Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga. Sehingga dengan adanya penelitian tersebut bisa memberikan evaluasi dalam meningkatkan pelaksanaan program peningkatan dalam ekonomi keluarga di Desa Tegalgondo agar dapat berjalan dengan baik di masa mendatang.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada institusi akademik dalam memberi referensi tambahan untuk memperluas pemahaman ilmu, karena institusi akademik adalah wadah yang banyak menampung kendala terhadap fenomena dalam hal kerjasama. Tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk menganalisis realisasi kerjasama Pemerintah Desa dan PKK dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga. Serta dapat mengetahui bagaimana bentuk kerjasama Pemerintah Desa dan PKK dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Tegalgondo.

2. Manfaat eksploratif

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh sebuah ilmu pengetahuan baru yang mungkin belum pernah dipelajari atau tidak ketahui. Dalam kerja sama Pemerintah Desa dan PKK ini bentuk kerjasama apa yang digunakan dalam meningkatkan ekonomi keluarga, sehingga dapat tercapainya peningkatan dalam ekonomi keluarga. Arah yang dituju dari adanya riset karya penulisan untuk mencari tahu bentuk kerjasama Pemerintah Desa dan PKK untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

3. Secara Teoritis

1. Membagikan berupa ilmu dan wawasan untuk peneliti mengenai bentuk kerja sama Pemerintah Desa dan PKK dalam meningkatkan ekonomi keluarga.
2. Dapat memberikan manfaat bagaimana pelaksanaan program PKK dalam meningkatkan ekonomi keluarga.
3. Bisa memberikan sumber pemikiran dan ilmu pengetahuan yang bisa memberi manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara luas.

D. Definisi Konseptual

Pengertian Definisi Konseptual adalah penerapan dalam lingkup mengenai penjelasan secara umum dan situasi khusus yang mencakup definisi terkait beberapa istilah konsep di dalam penelitian yang dilakukan. yang dilakukan peneliti untuk memberikan makna definisi atau konsep yang di gunakan ketika meneliti fenomena. Pada defini konseptual akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Kerja Sama

1. Pengertian Kerjasama Menurut teori dari Landsberger (2011) dalam Leonard Lobo dalam jurnalnya (Pendidikan et al., 2023) kerjasama atau belajar secara bersama merupakan proses berkelompok anggota-anggotanya mendukung dan saling mengandalkan untuk mencapai suatu hasil mufakat. Selain itu kemampuan kerjasama mampu meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berinteraksi, serta melatih peserta kelompok atau organisasi beradaptasi dengan lingkungan baru. Teori tersebut sejalan dengan pendapat (Marlina, 2021) Kerjasama merupakan kegiatan usaha untuk mencapai tujuan yang dikerjakan oleh antar manusia atau secara berkelompok. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi yang membutuhkan komunitas untuk berinteraksi sosial. Sebab masing orang dilahirkan didunia saat ini tidak bisa melakukan pekerjaan atas kebutuhan diri sendiri, tanpa campur tangan bantuan manusia lain.

Sesuai dengan pendapat (Sarwono & Ihalauw, 2021) bahwa kerjasama merupakan jenis kelompok yang terdiri dari beberapa individu yang melaksanakan suatu pekerjaan di bawah peraturan dan pedoman. Hal tersebut memaparkan bahwasanya kerja sama dibutuhkan sekelompok orang yang mempunyai tupoksi dalam menjalankan tujuan organisasi.

2. Bentuk Kerjasama Pemerintah Desa dan PKK

Menurut penelitian ini berdasar pada teori *intergovernmental* menurut Wright (1974) dalam Irawanto (Irawanto, 2015) yang terdiri dari lima bentuk antara lain yaitu the roles of government, the interaction of public officials, sustainability communication, the roles of administrator, focus attention on the policy. Kerjasama akan timbul ketika seseorang sadar bahwa sekelompok orang mempunyai kepentingan yang relevan terhadap satu sama lain. Juga pada saat yang sama beberapa individu atau golongan tersebut punya pengetahuan dan mampu mengesampingkan kepentingan ego sendiri demi kepentingan tujuan bersama. Pada teori *intergovernmental* menurut Wright dalam Irianto (Irawanto, 2015) tersebut bisa kita jumpai masing-masing bentuk dari kerjasama, dengan demikian kerjasama bisa dibagi beberapa bentuk :

1. The Roles of Government

The Roles Of Government atau Peran Kerjasama Pemerintah pengertiannya pada kerjasama ini, setiap pihak mempunyai peran masing-masing. Bentuk kerjasama ini menekankan ada hubungan antar unit pemerintahan dan lembaga.

2. The Interaction of Public Officials

The Interaction of Public Officials atau Interaksi Pejabat Publik dalam pengertian kaitannya dengan kerja sama antar Pemerintah Desa dan PKK mempunyai penting karena akan menentukan keberlanjutan kerja sama.

3. Sustainability Communication

Sustainability Communication atau Komunikasi Antar Pejabat yang dimaksud adalah Interaksi yang dilakukan antar para Pemerintah Desa dan Kader PKK secara teratur menunjukkan terjadinya komunikasi yang berlanjut.

4. The Roles of Administrator

The Roles of Administrator atau Peran Administrasi yang dimaksud

Pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Desa dan PKK dalam pengembangan pelaksanaan program ekonomi keluarga yang terlibat dari peran pejabat eksekutif dan legislatif.

5. Focus on The Policy

Focus Attention the Policy atau Fokus Kebijakan yang dimaksud pada dampaknya terhadap kebijakan lain yaitu melihat sejauh mana kebijakan umum ditindak lanjuti secara operasional.

2. Pemerintah Desa

Menurut (Sugiman, 2018) Pemerintah Desa sendiri ialah pemerintahan yang dinaungi seorang kepala desa yang membawahi Kerjasama ialah bagian dari bentuk kerjasama berdasarkan pihak-pihak yang perangkat desa yang bekerja pelaksana atau penyelenggara pemerintahan yang ada di desa. Pemerintah desa secara khusus bertugas menyelenggarakan penyelenggara yang dibagi dari melaksanakan pembangunan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan membina kemasyarakatan. Terkait pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 terkait pemerintahan desa, Tujuan utama Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ditahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah memberi perlindungan seluruh bangsa Indonesia dan semua tumpah darah Indonesia, majukan kesejahteraan umum, mecintaptakan kecerdasan kehidupan bangsa, dan mengikuti pelaksanaan tertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pendapat itu sejalan pada (Barniat, 2019) bahwa Pemerintahan Desa ialah satuan terkecil dari organisasi pemerintahan, menurut gagasan teoritis para peneliti tentang desa. Demi terwujudnya kemasyakarakatan makmur dan sejahtera mandiri di pedesaan, maka ada peraturan UU yang berkaitan dengan desa diatur dari pemerintah juga tetap mempertimbangkan landasan berfikir. Hal ini memungkinkan konsepstual hukum mengenai desa desa membagi otonom melalui kewenangan sejak era reformasi melalui UU yang sejalan dengan hak otonom pemerinta desa yang lebih besar juga mandiri.

3. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Satu-satunya organisasi masyarakat di desa atau kota disebut Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, yang kemudian berganti nama menjadi PKK. Dari tujuan organisasi dibuat untuk memberdayakan wanita supaya mereka bisa bermandiri dan berkontribusi pada komunitas mereka. PKK merupakan strategi pembangunan nasional untuk membangun yang hadir dari bawah yakni masyarakat dan digunakan oleh, dari, dan kepada masyarakat desa. Pemberdayaan Keluarga merupakan upaya serius dilaksanakan anggota biar bisa hidup sehat, mandiri, dan maju. Pada Kesejahteraan Keluarga ialah mampu memenuhi kebutuh dari segi aspek sosial, material, mentalitas, dan spiritualitas yang mampu bagi setiap anggota keluarga biar bisa menghidupi sebagai masyarakat yang berguna(Nurdewanto et al., 2015).

4. Perekonomian Keluarga

Menurut teori dari (Sulistiyani et al., 2021) ekonomi keluarga merupakan sebuah studi tentang bagaimana orang mencoba memuaskan kebutuhan mereka dengan melakukan hal-hal selalu dijalankan oleh beberapa orang yang punya tanggung jawab pada kebutuhan mereka. Perempuan memainkan peran penting baik di ranah publik (masyarakat) maupun domestik (keluarga). Perempuan memahami posisi mereka dalam menjaga stabilitas keuangan keluarga terkait dengan keterlibatan mereka dalam mengelola keuangan keluarga, baik yang berasal dari pekerjaan produktif mereka maupun dari hasil mata pencaharian suami. Dalam rangka mempertahankan dan bahkan memperkuat ekonomi keluarga, perempuan mampu memanfaatkan sumber daya ekonomi dengan memanfaatkan modal sosial yang mereka miliki, yang berupa jaringan sosial di masyarakat.(Pemikiran & Volume, 2012).

Dalam peningkatan ekonomi keluarga dibutuhkan adanya pemberdayaan kepada lingkungan masyarakat. Untuk mencapai peningkatan ekonomi keluarga dibutuhkan partisipasi dari elemen masyarakat termasuk organisasi sosial PKK. Untuk memastikan bahwa para ibu dan perempuan di Desa Tegalgondo tidak menghadapi hambatan didalam menolong suami mencari penghasilan dan juga akhirnya berkontribusi terkait meningkatannya kesejahteraan ekonomi

keluarga, maka sudah menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, untuk memberdayakan potensi perempuan dan keluarga (Lano, 2017). Organisasi PKK dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, mengintegrasikan perempuan ke dalam layanan pemerintah, dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Disarankan agar para wanita sering mengunjungi posyandu, atau pusat kesehatan, untuk ibu dan anak. Selain itu, PKK biasanya menawarkan penyuluhan yang sering kepada para wanita untuk menumbuhkan kreativitas mereka..

E. Definisi Operasional

Dari definisi operasional merupakan uraian atau penjelasan yang merujuk pada variabel yang dipilih oleh peneliti. Hal tersebut dilakukan agar menghindari perbedaan maupun penyamaan tafsiran yang dibuat oleh peneliti lain. Juga menjadi sebuah alat instrumen oleh suatu penelitian riset, dikarenakan tahapan penting dari suatu prosedur mengumpulkan riset data. Definisi operasional yaitu definisi yang punya dasar oleh kualitas yang bisa diamati berasal objek yang masih akan didefinisikan, ataupun transformasi ide menjadi konstruk dengan menggunakan bahasa untuk mengkarakterisasi tindakan ataupun reaksi yang bisa diujikan, diamati, dan diverifikasi oleh orang lainnya.

Yang didasarkan judul penelitian “Kerjasama Pemerintah Desa dan PKK dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga” Maka yang perlu dijelaskan dalam definisi operasional meliputi:

A. Bentuk Kerjasama Pemerintah Desa dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Intergovernmental merupakan sebuah bentuk bentuk kerjasama yang terjadi antara kedua lembaga dengan pemerintah desa ataupun dengan lembaga masyarakat yang mana memiliki bentuk hubungan yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman Wright dalam Irianto (Irawanto, 2015):

1. The Roles of Government

Peran Kerjasama Pemerintah Desa dan PKK mempunyai hubungan antara kepala dan mitra lembaga. Dalam pelaksanaan fungsinya pada kerjasama dengan PKK, Kepala Desa mempunyai tiga fungsi fasilitator, katalisator dan regulator. Berdasarkan antara teori pemikiran-pemikiran para pakar sebelumnya, terdapat kesamaan dengan peran Pemerintah Desa dari teori yang dikemukakan oleh Gede Diva (Diva, 2009) diantaranya yaitu:

A. Fasilitator

Peran Kerjasama Pemerintah Desa dan PKK sebagai fasilitator, artinya di dalam meningkatkan program kerja PKK, peran Pemerintah Desa harus memberikan fasilitas bagi PKK saat melakukan pelaksanaan program kegiatan seperti menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung setiap pelaksanaan program kegiatan.

B. Regulator

Peran Pemerintah Desa sebagai regulator, yaitu membuat kebijakan-kebijakan yang akan berdampak untuk meningkatkan program kerja PKK desa dalam pelaksanaan program kegiatan. Seperti menentukan perencanaan dan pelaksanaan program kerja PKK.

C. Katalisator

Peran Pemerintah sebagai katalisator, disini Pemerintah Desa berperan sebagai pihak yang dapat mempercepat proses perkembangan para kader PKK dalam dalam pelaksanaan program kegiatan. Pemerintah Desa punya peran aktif dalam membantu PKK untuk mengembangkan program yang akan dilaksanakan. Seperti berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait yang membantu dalam pelaksanaan program kegiatan.

2. The Interaction of Public Officials

The Interaction of Public Officials atau Interaksi Antar Pejabat Publik yang dimaksud interaksi kolaboratif antara Pemerintah Desa dan PKK, membangun iklim sosial yang mendukung dan mempromosikan praktik manajemen yang memastikan perlakuan yang adil di antara anggota organisasi.

3. Sustainability Communication

Komunikasi yang berkelanjutan menunjukkan interaksi yang teratur antara pejabat yang mewakili masing-masing daerahnya serta unit pemerintah yang terlibat didalam kerja sama tersebut. Aspek komunikasi ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain frekuensi kontak dari hari ke hari, hubungan kerja yang terjalin yang selanjutnya membentuk pola kumulatif.

4. The Roles of Administrator

Pada kerjasama Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga peran para administrator yang merupakan manajer puncak dalam pelaksanaan kerjasama antar pemerintah dan lembaga masyarakat. Berbagai keputusan yang diambil para administrator dapat menimbulkan peningkatan pendapatan rakyat, stabilitas keamanan, kesejahteraan terutama pada pelaksanaan rencana kerja.

5. Focus on The Policy

Fokus Pada Kebijakan adalah kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung-jawaban secara periodik.

B. Faktor Penghambat dan Pendukung Kerjasama Pemerintah Desa dan PKK

Pada Pelaksanaan pengembangan mempunyai tantangan dalam pelaksanaannya seperti faktor penghambat dan pendukung. Beberapa faktor-faktor yang membuat sebab diberlakukan faktor internal dan eksternal pada kerja sama antara organisasi Pemerintah Desa dan PKK. Demikian faktor-faktor ini beberapa sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat
 - a. Minimnya partisipasi masyarakat
 - b. Anggaran terlalu minim
 - c. Kualitas SDM yang masih rendah
 - d. Fasilitas yang belum memadai

2. Faktor Pendukung
 - a. Sumber Daya yang Melimpah
 - b. Anggaran Dana Desa (ADD)
 - c. Fasilitas Desa Mendukung
 - d. Kapasitas SDM yang terpenuhi

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian.

Pada riset penulisan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian oleh kualitatif yang berkaitan dengan subjek penelitian, peneliti terlibat dalam konteks dengan keadaan dan latar peristiwa alamiah. Teknik kualitatif, sesuai yang didefinisikan dari Bodgan dan Taylor, dari hasil kutip oleh Lexy J. Moleong, adalah adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data dan perilaku yang dapat diamati. Mereka menyatakan bahwa strategi ini mengambil pendekatan komprehensif terhadap situasi dan individu tersebut. Tujuan adanya pendekatan riset deskriptif ialah sebagai menggambarkan suatu budaya atau kelompok individu tertentu, suatu gejala, atau kaitan antar dua fenomena bisa lebih dari itu (Moleong, 2007).

Tujuannya dari riset kualitatif ialah supaya paham situasi pengaturan yang menampilkan gambar yang menyeluruh dan mendetail tentang kondisi konteks tersebut secara menyeluruh. deskripsi yang sangat luas dan mendalam tentang kondisi di suatu wilayah alamiah, tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. tentang konteks (situasi alamiah) tentang apa yang sebenarnya terjadi sehubungan dengan pokok bahasan (Olsson, 2008). Dalam menganalisis data-data untuk cara mengambil dan mengatur sistematika pada catatan dari hasil berupa observasi, wawancara, juga yang lain supaya memberi pemahaman lebih peneliti terkait fenomena yang dikaji dan menyajikanya untuk hasil penemuan bagi masyarakat luas. Supaya bisa ditingkatkan pemahman penganalisisan harus dilanjutkan dengan berusaha memilah arti dan makna.

Pendekatan penelitian kualitatif merupakan metodologi yang berbasis pada

hasil kualitas. Maksud dengan kualitas ialah bisa paham pada suatu fenomena secara lebih dalam kebenarannya. Pada data kualitatif analisis deskriptif penggunaan analisis yang dipakai selanjutnya hasil yang sesuai pada pendeskripsikan, memaparkan, analisis serta merangkum kasus atau meneliti berupa fenomena sosial. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, wawancara langsung, atau kunjungan lapangan. Analisis deskriptif semacam ini berusaha memberikan gambaran yang rinci mengenai fenomena yang telah diteliti. Penelitian ini digunakan untuk menyesuaikan judul pada “ Kerjasama Pemerintah Desa dan PKK Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Tegalondo Kabupaten Malang, kemudian ditarik kesimpulan dengan cara menganalisis data untuk memperoleh hasil penemuan pada data-data yang dikumpul dan dikaji oleh beberapa cara, seperti wawancara, observasi, dokumen, juga punya kaitan oleh topik riset penulisan.

2. Sumber data

Sumber data pada penulisan riset adalah organisasi sosial PKK dalam melakukan pemberdayaan demi kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan teori efektivitas gibson, dengan melakukan analisis dan observasi terhadap bagaimana pengembangan organisasi sosial yang mampu memberdayakan kesejahteraan masyarakatnya menjadi masyarakat yang mandiri sebagai dasar dari melalui pengamatan dan observasi tersebut. penulis memperoleh data dengan penggunaan dua sumber pendataan, yaitu:

a) Sumber data primer

Data pokok atau primer merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh sumbernya. Pada riset penulisan ini sumber primer ini berupa wawancara dengan Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Kepala Seksi Pemerintahan Juga Kader PKK Desa Tegalondo. Juga dengan observasi pada kegiatan yang dilakukan Pemerintah Desa dan PKK mengenai bagaimana hubungan kerjasama Pemerintah Desa dan PKK dalam meningkatkan ekonomi keluarga di desa tegalondo.

b) Sumber data sekunder

Data sekunder ialah tambahan data-data bisa didapatkan berasal buku, jurnal, dokumen, arsip, literatur, koran, majalah, dan internet. Disini penulis juga mengambil dari sumber-sumber data sebagai referensi dan juga relevan terhadap dengan objek yang diteliti.

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan sistematis terhadap teknik pengumpulan data yang akan diteliti. Peneliti mengamati kegiatan secara langsung dari tahap pra-survei hingga pengumpulan data secara langsung. Juga dilakukan dengan cara mengamati dengan situasi sebenarnya situasi bisa juga dilaksanakan pada pengaturan situasi yang secara khusus bisa dilakukan. Penulis mengumpulkan sumber data-data melalui observasi langsung yang tidak berstruktur dengan cara mengamati lokasi penelitian, seperti mengikuti penyusunan program kegiatan dan pelaksanaan program kegiatan. Kemudian peneliti mencatat apa saja yang diamati dan mendeskripsikan berupa deskripsi secara utuh yang sesuai dengan subyek yang diteliti.

b) Wawancara

Penelitian melalui pengumpulan data pada wawancara secara tatap muka dengan Pemerintah Desa dan tim PKK yang terkait dalam program pemberdayaan masyarakat desa tegalgondo. Selain itu menurut sugiyono (Ramadhan & Sugiyono, 2015) bahwa pemilihan data sumber pada skripsi untuk menelitian kualitatif metodel sampel data sumber hasil ditampilkan punya sifat hipotetik, tetapi penulis proposal harus mengidentifikasi sumber data yang potensial.

Data sumber Informan pada yang dituju narasumber pada riset penulisan ialah Kepala Desa Tegalgondo, Kepala Seksi Pemerintahan dan anggota serta pengurus organisasi PKK Desa Tegalgondo Kecamatan Karangpulo Kabupaten Malang. Tujuan wawancara untuk menggali data, mendapat jawaban hipotesis kerja, mendapat informasi terkait penelitian. Responden

dipilih sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman yang dalam terkait topik yang diteliti.

c) Dokumentasi

Dokumentasi juga diperlukan dalam mendukung bahan penelitian untuk mendukung dan sebagai validasi keabsahan data yang akan dianalisis. Studi dokumentasi memungkinkan identifikasi perbedaan antara hasil observasi dan wawancara dengan informasi yang didokumentasikan. Metode dokumentasi memberi kontribusi yang penting dalam memperkuat data yang diperoleh dan memiliki relevansi dengan penelitian ini. Seperti buku Hasil Rakernas IX PKK Nasional Tahun 2021, Laporan Tahunan PKK Desa Tegalgondo Tahun 2022, Buku data kegiatan PKK Desa Tegalgondo dan Buku Daftar Hadir Kegiatan PKK Desa Tegalgondo.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis yang bertempat di kantor Desa Tegalgondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah bentuk kegiatan yang dilakukan supaya dapat merubah data dari sumber riset menghasilkan informasi terbaru yang bisa dipakai dalam membentuk simpulan. Pada teknik analisis data-data dapat digunakan sebagai pemroses meneliti, pengkajian, perubahan dan pemetaan data supaya dapat mencari informasi yang bermanfaat, memberi informasi kesimpulan dan mendorong dalam mengambil putusan. Tujuan dari penganalisis data ini dapat mengklarifikasi pemahaman dari suatu data rill, kemudiandibikin sesuatu kesimpulan sebagai hasil oleh data-data dari yang telah ditemukan pada dilapangan.

6. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian. Sehingga bisa dianalisis yang ada dituju, mengesekkusi, mengarahkan, mengelompokkan, mengordinir data, dan memilah padanan kata yang tidak dipakai dengan cara yang kompatibel. Oleh sebab itu, bisa didapatkan dan dihasilkan simpulan yang bisa diverifikasi dan ditarik kebenarannya

